

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur :

- Abdullah, Rozali. 1994. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.* , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basah, Sjachran. 1989. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 1982. *Dasar – Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia.
- Hadjon, Philipus M. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoyo, Hestu Cipto. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Harahap, Zairin. 2015. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan. 2007. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Usaha Negara.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. 1996. *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Usaha Negara*, Buku II. Cetakan Keenam. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kurde, Nuktoh Arfawie. 2005. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud Marzuki, Peter 2011. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemantri, Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Alumni.

Tjandra, W. Riawan. 2005. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wiyono, R. 2005. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wiyono, R. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang No.5 tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 tahun 2004 jo Undang-Undang No 51 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden No.30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Pentunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

**Putusan Pengadilan :**

Putusan No. 270/G/TUN/2015/PTUN-JKT.

**Sumber lain :**

Moh. Mahfud MD., 2014, *Keadilan Substantif*, Jakarta, Koran Sindo, Vol. 1 No.1, September 2014, di akses di <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/>, pada tanggal 20 Oktober 2017.